

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Good Governance menurut Arti & Rizky (2023) merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan tanggung jawab, efektivitas, efisiensi, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tertentu yang merupakan bagian dari konsep *Good Governance*. Upaya untuk menerapkan prinsip tersebut telah dimulai sejak memasuki era reformasi. Dengan kata lain, perjalanan menuju terwujudnya *Good Governance* telah berlangsung cukup lama. Namun demikian, hingga saat ini penerapan *Good Governance* di Indonesia belum menunjukkan hasil yang optimal. Berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, partisipasi serta isu lainnya yang mencerminkan bahwa penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* belum sepenuhnya berhasil direalisasikan.

Penerapan *Good Governance* menjadi hal yang sangat penting dalam membentuk tata Kelola pemerintah daerah yang akuntabel, transparan, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan terbebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pernyataan ini sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang membuka ruang lebih luas bagi pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, serta tugas pembantuan. Namun, pada kenyataannya hingga saat ini penyelenggaraan pemerintahan,

khususnya di tingkat daerah dalam era globalisasi, masih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* secara menyeluruh (Makalikis et al., 2022).

Salah satu aspek penting dalam kegiatan administrasi dalam pemerintahan yang menuntut penerapan prinsip tata kelola yang baik serta menjadi kewajiban bagi setiap organisasi yaitu disebut sebagai pengelolaan anggaran. Pelaksanaan anggaran harus dilakukan secara tepat dan cermat agar seluruh aktivitas yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan sistem penganggaran yang optimal, suatu organisasi memiliki peluang untuk mencapai efisien dalam pengelolaan anggaran serta menjaga keberlanjutan operasional dalam jangka Panjang. Pengelolaan anggaran yang efisien melibatkan penggunaan sumber daya secara optimal untuk memaksimalkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat (RI, 2024). Untuk terwujudnya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi memerlukan dukungan dari sistem pengelolaan anggaran yang efektif, sehingga mampu menghasilkan informasi yang relevan serta mudah dipahami oleh berbagai pihak.

Akuntabilitas dalam pemerintahan sangat penting untuk menciptakan sistem yang bersih dan bebas dari korupsi. Akuntabilitas menurut Nurhidayat, (2023) merupakan segala bentuk kegiatan atau program yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Para pengambil keputusan dalam pemerintahan

baik yang berasal dari sektor swasta maupun masyarakat sipil, memiliki tanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga pemangku kepentingan. Tingkat akuntabilitas ditentukan oleh fokus organisasi yang dapat diarahkan untuk kepentingan internal atau eksternal (Karso, 2022).

Transparansi anggaran sangat penting dalam pemerintahan karena berkaitan dengan dana publik berasal dari pajak dan sumber pendapatan negara lainnya. Transparansi atau juga yang dimaknai sebagai keterbukaan, mencerminkan kemudahan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan publik yang menyediakan informasi yang akurat bagi publik yang membutuhkan. Adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya kritis dalam masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Nurhidayat, 2023).

Prinsip *Good Governance* yang baik tidak hanya bergantung pada transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga dengan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam prosesnya. Menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) 1997 (dalam Megawati et al., 2024) partisipasi secara luas dalam proses pengambilan Keputusan menjadi hal yang penting, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan resmi yang mewakili aspirasi mereka. Partisipasi yang inklusif ini didasarkan pada jaminan kebebasan untuk menyampaikan pendapat serta adanya kemampuan

individu dan kelompok untuk berkontribusi secara positif dalam proses tersebut. Prinsip partisipasi dalam *Good Governance* sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan publik mencerminkan aspirasi masyarakat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BappedaLitbang) Kabupaten Tegal merupakan unsur penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah (BPK, 2021). BappedaLitbang berperan penting dalam merancang dan melaksanakan kebijakan pembangunan daerah, baik dalam aspek perencanaan, penelitian, maupun pengembangan yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BappedaLitbang bertanggung jawab menyusun kebijakan anggaran yang selaras dengan rencana pembangunan daerah serta memastikan anggaran dialokasikan sesuai dengan prioritas pembangunan. Pengelolaan anggaran di BappedaLitbang harus didasarkan pada prinsip *Good Governance* untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan anggaran di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan tersebut antara lain rendahnya keterbukaan dalam tahap penyusunan, pelaksanaan anggaran, dan lemahnya sistem mekanisme akuntabilitas yang terbatas, serta kurangnya keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan anggaran. Tantangan ini dapat menghambat pencapaian efektivitas dan akuntabilitas implementasi

prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran daerah (Sungkar, 2023). Berdasarkan temuan di BappedaLitbang Kabupaten Tegal diketahui bahwa dalam pengelolaan anggaran secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, salah satunya dimana keterlibatan pegawai dalam proses pengelolaan anggaran beberapa kali tidak tepat waktu. Dalam era pemerintahan yang menekankan pada tata kelola yang baik, prinsip *Good Governance* akuntabilitas, transparansi dan partisipasi menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam setiap pengelolaan pemerintah, salah satunya pengelolaan anggaran.

Berdasarkan fenomena dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Prinsip *Good Governance*: Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh prinsip *Good Governance* akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana pengaruh prinsip *Good Governance* transparansi terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal?
3. Bagaimana pengaruh prinsip *Good Governance* partisipasi terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal?

4. Bagaimana pengaruh prinsip *Good Governance* akuntabilitas, prinsip transparansi dan prinsip partisipasi secara simultan terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *Good Governance* akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal
2. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *Good Governance* transparansi terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal
3. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *Good Governance* partisipasi terhadap pengelolaan anggaran di BappedaLitbang
4. Untuk mengetahui pengaruh prinsip *Good Governance* akuntabilitas, transparansi dan partisipasi secara simultan terhadap pengelolaan anggaran.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal.

2) Bagi Politeknik Harapan Bersama

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi terkait pengaruh prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan anggaran di BappedaLitbang Kabupaten Tegal, sehingga dapat berguna bagi penulis selanjutnya yang ingin mengangkat topik serupa.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman langsung bagi penulis terkait Pengaruh prinsip *Good Governance* Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap pengelolaan anggaran. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian Tugas Akhir.

2) Bagi BappedaLitbang Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi BappedaLitbang Kabupaten Tegal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* khususnya dalam aspek akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan anggaran.

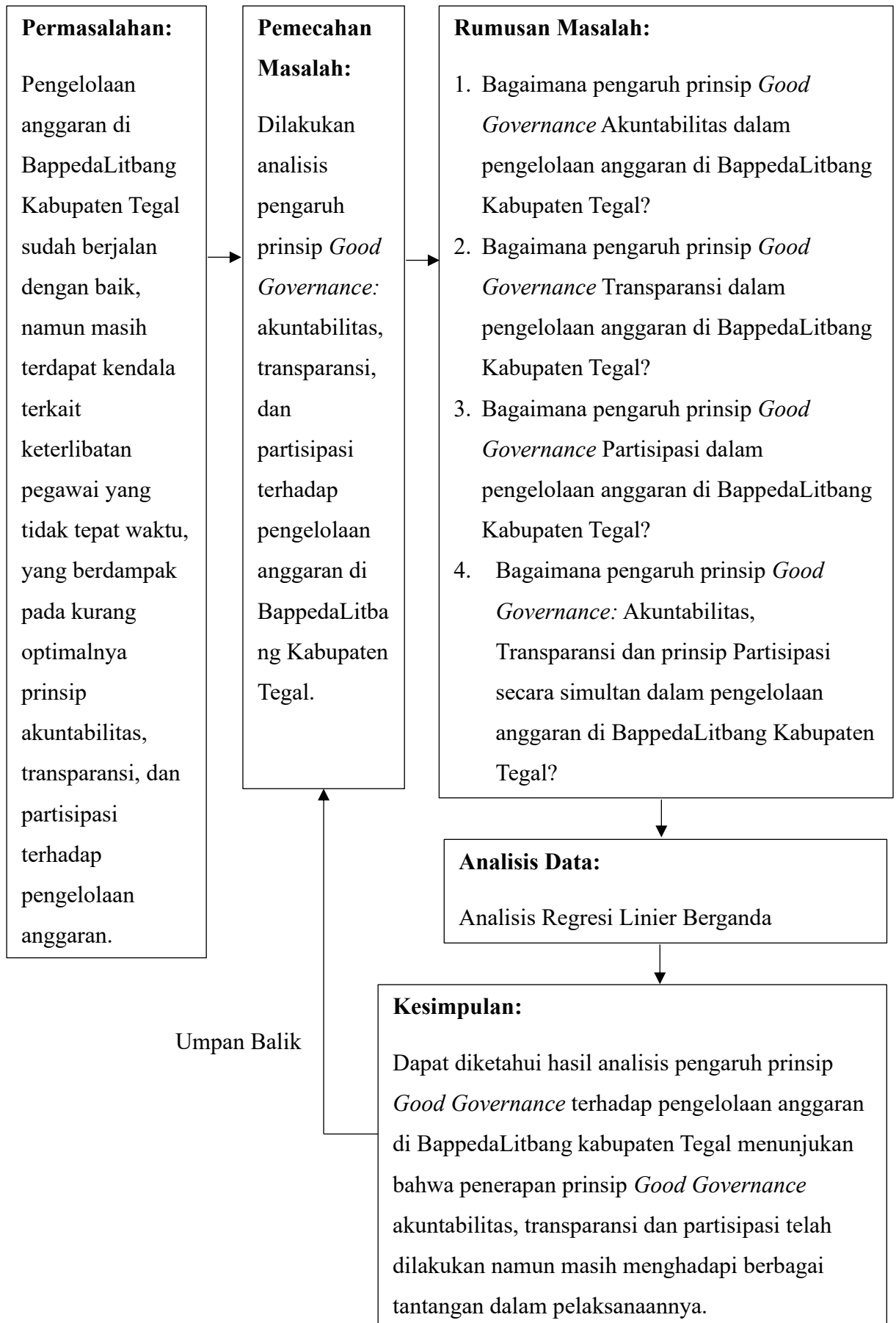
1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan masalah untuk memberikan pembahasan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Batasan Masalah dalam penelitian ini memfokuskan pengelolaan anggaran pada satu instansi yaitu

BappedaLitbang Kabupaten Tegal. Penelitian ini hanya menilai tiga prinsip utama *Good Governance* yaitu Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi.

1.6 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menurut Nasution (2022) merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-fakta, observasi dan telaah kepustakaan. Berdasarkan temuan dari BappedaLitbang Kabupaten Tegal, pengelolaan anggaran secara umum sudah berjalan dengan baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah beberapa kali kurangnya keterlibatan pegawai secara tepat waktu dalam proses pengelolaan anggaran. Ketidaktepatan waktu tersebut menyebabkan kesulitan tersendiri bagi bendahara pengeluaran dalam mengatur dan mengelola anggaran secara efisien dan akuntabel. Untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan analisis pengaruh prinsip *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi dalam proses pengelolaan anggaran. Dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis regresi, hasil analisis menunjukkan bahwa ketiga prinsip itu sudah diterapkan, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal ketepatan waktu, keterbukaan informasi dan keterlibatan pegawai secara aktif.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

1.7 Sistematika Penelitian

Dalam penelitian Tugas Akhir ini dibuat sistematika penelitian agar mudah dipahami dan memberikan Gambaran secara umum kepada pembaca mengenai Tugas Akhir ini. Sistematika penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

HALAMAN JUDUL

Halaman Judul berisi Judul Tugas Akhir, Logo, Tugas Akhir, Nama Mahasiswa, NIM, Nama Program Studi dan Tahun.

HALAMAN PENGESAHAN

Halaman pengesahan berisi judul tugas akhir, tulisan halaman pengesahan nama mahasiswa, NIM, tulisan Tugas Akhir, nama dan tanda tangan pembimbing I dan II, nama dan tanda tangan Ketua Program Studi.

DAFTAR ISI

Daftar isi dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara lebih rinci dari sistematika Penelitian Tugas Akhir. Oleh karena itu judul dan sub-sub judul yang ditulis dalam daftar isi harus langsung ditunjukkan nomor halamannya.

1. Bagian Awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian

awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini berisi kajian Pustaka yang memuat penjelasan dasar teori-teori tentang konsep *Good Governance* dan prinsip *Good Governance* akuntabilitas, transparansi dan partisipasi, pengelolaan anggaran.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian diuraikan dengan jelas metode yang digunakan dalam penyelesaian masalah penelitian, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penelitian berakhir. Bab ini berisi lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi gambaran objek penelitian, laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi tentang garis besar dari inti hasil penelitian serta saran dari penulis yang diharapkan berguna bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisi tentang daftar buku dan *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Daftar Pustaka yang dipakai dalam proposal penelitian Tugas Akhir dengan menggunakan format APA (*American Psychological Association*).

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.